

## Organisasi Kemahasiswaan Sebagai Wadah Pembelajaran Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila

Habibul Umam Taqiuddin<sup>1</sup>, Baiq Mulianah<sup>2</sup>, Baiq Solatiah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia  
[habibulumamtaqiuddin1986@gmail.com](mailto:habibulumamtaqiuddin1986@gmail.com)<sup>1</sup>, [Baiqmulianah1@gmail.com](mailto:Baiqmulianah1@gmail.com)<sup>2</sup>, [baiqsolatiah@gmail.com](mailto:baiqsolatiah@gmail.com)<sup>3</sup>

**Keywords:** Organisasi kemahasiswaan; Wadah Pembelajaran; Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila.

**Abstract :** Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk memahami secara mendalam hubungan organisasi kemahasiswaan (ormawa) dan pembelajaran nilai-nilai demokrasi Pancasila, 2) untuk menganalisa bentuk penerapan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan memanfaatkan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini yang berasal dari buku dan jurnal-jurnal ilmiah. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan (ormawa) berfungsi untuk melatih mahasiswa agar siap terjun ke masyarakat, maka organisasi kemahasiswaan (ormawa) memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah pembelajaran dalam rangka penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Secara nyata bentuk penerapan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan tercermin dalam musyawarah mahasiswa/ sidang umum yang mana mahasiswa bebas mengemukakan pendapat, belajar menghargai pendapat orang lain, dan menjalankan mekanisme pengambilan keputusan dengan menjunjung tinggi musyawarah mufakat.

### 1. PENDAHULUAN

Demokrasi Pancasila adalah perwujudan pelaksanaan Pancasila dalam politik, dalam ekonomi, dalam sosial dan dalam budaya. Demokrasi Pancasila merupakan satu kesatuan makna yang tak terpisahkan. Keduanya sudah menjadi satu kata majemuk baru. Kata Pancasila dalam kata majemuk itu bukanlah embel-embel, akan tetapi dua kata Demokrasi dan Pancasila yang menjadi satu pengertian yang tak terpisahkan. (Novianty & Firmansyah, 2020). Demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Sudrajat, 2016)

Berdasarkan sila ke-empat Pancasila, negara berkedaulatan rakyat menjadi landasan absolut dalam kehidupan politik negara Indonesia. Artinya, bahwa sifat demokrasi tidak

dapat diubah atau bahkan dihilangkan dalam politik negara. Demokrasi menjadi suatu hal yang mutlak. Namun, dalam sila ke-empat mengandung pula sila-sila yang lain yang menjadi konsekuensi Pancasila sebagai suatu sistem. Kerakyatan dalam konteks sila ke-empat ini adalah kerakyatan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, Yang berkemanusiaan adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, jalannya demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang disinari oleh sinar-sinar Ketuhanan, yang dijalankan secara beradab dan berkemanusiaan dalam persatuan Indonesia dan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Susanto, 2021)

Demokrasi Pancasila mengajarkan menggunakan akal sehat melalui musyawarah mufakat. Musyawarah tidak mengajarkan pembuatan keputusan dengan cara pemilihan suara (*voting*), karena *voting* merupakan ajaran dari Demokrasi Liberal. Keputusan dengan cara *voting* belum tentu benar, karena yang dijadikan

standar pengambilan keputusan adalah suara terbanyak. Bisa jadi keputusan yang ditetapkan adalah keputusan yang akan menyengsarakan orang banyak dan hanya mensejahterakan sekelompok orang saja. Hal ini tidak perlu dipikirkan yang penting adalah keputusan itu sudah sesuai dengan prosedur, yaitu suara terbanyak. Keputusan yang demikian dapat terjadi, bahkan sering terjadi, karena sekelompok orang yang akan diuntungkan mampu membayar kepada para pengambil keputusan. (Prabowo, 2011) Setiap keputusan harus didasari dengan musyawarah sekecil apapun suatu perkara itu. Dalam setiap permasalahan juga harus dilandasi dengan adanya gotong royong atau penyelesaian secara bersama-sama dan kerjasama dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. (Alwan, 2021)

Untuk membangun cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi Pancasila, diperlukan peran serta organisasi kemahasiswaan. Pada dasarnya semua organisasi kemahasiswaan memahami dan menyadari betul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. (Hijriadi Askodrina, 2022)

Hasil penelitian dari Elly Hasan Sadeli dan Eko Priyanto menunjukkan bahwa; 1) Pengurus dan anggota IMM korkom UMP dan Soedirman belum memiliki pemahaman yang utuh terhadap konsep demokrasi Pancasila, namun dalam menjalankan organisasi para pengurus dan anggota sebenarnya telah melaksanakan benih-benih praktek demokrasi Pancasila dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, 2) Secara konkrit dalam mengantisipasi paham radikal, organisasi IMM sendiri tentu saja memperkuat dan menyesuaikan rancangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) agar tidak disisipkan paham tersebut. AD/ART sebagai pilar pergerakan organisasi harus menunjukkan dan mewakili ideologi Pancasila dan kemuhammadiyah sebagai ruh dan dasar perjuangan. Juga disepakati agar para pengurus dan anggota berkomitmen dalam menunjukkan aksi dan pemikirannya yang dilandasi oleh semangat demokrasi Pancasila dan tentu saja Muhammadiyah. Tanpa komitmen dan prinsip yang kuat, maka paham radikal akan mudah masuk ke dalam tubuh organisasi. 3) Setiap akan

melaksanakan kegiatan, pengurus IMM diberikan ruang publik untuk berdiskusi melalui musyawarah. Inilah sebenarnya sebagai benih dari demokratisasi. Dinamika yang terjadi di tubuh IMM senantiasa dijadikan sebagai perbedaan dengan dasar *rahmatan lil 'alamin*. 4) Bahaya masuknya paham radikal, bagi IMM tidak ada sosialisasi yang khusus, namun senantiasa membangun dan membuka ruang diskusi rutin membahas pemahaman radikal. Oleh karena itu, pentingnya membangun pemahaman demokrasi Pancasila terhadap seluruh anggota juga dilakukan melalui proses dialogis dan implementatif. (Sadeli & Priyanto, 2020)

Hasil penelitian Muhammad Anwar Rube dan Andi Ridwansyah menunjukkan bahwa budaya demokrasi yang dilaksanakan oleh HIMA PPKn IKIP-PGRI Pontianak selama ini sudah mencerminkan nilai-nilai demokrasi yaitu: memiliki kepribadian demokratis, memberikan kebebasan mengemukakan pendapat, memiliki tanggung jawab, memiliki sikap toleransi, memiliki rasa nasionalisme, dan memiliki kebersamaan. Apabila nilai-nilai budaya demokrasi dilaksanakan dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap pembentukan watak kewarganegaraan (Civic Disposition) pada mahasiswa. (Rube'i & Ridwansyah, 2017)

Sementara itu hasil penelitian dari Wahyu Hidayat, Taufikurrahman menunjukkan bahwa pada proses konstruksi pemahaman demokrasi dilakukan oleh Pengurus Besar HMI dengan melakukan diskusi, pelatihan kepemimpinan dan pembuatan jurnal. Pemahaman ini dilegitimasi yang disandarkan pada Nilai-Nilai Dasar Perjuangan HMI sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Kemudian diinternalisasikan dalam rumusan RUU Politik. Pengaruhnya terhadap dinamika demokrasi di Indonesia yakni sebagai pendukung ideologi Pancasila, membangun sistem politik yang pro-demokrasi dan pembangunan Civil Society. HMI sebagai organisasi keagamaan yang berbasis Islam mampu menerima demokrasi sebagai ajaran Islam. (Hidayat & Taufikurrahman, 2020)

Berdasarkan hal tersebut di atas, demokrasi Pancasila juga seharusnya diterapkan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, mengingat mahasiswa di pundaknya tertanam harapan besar untuk dapat menyalurkan dan memperjuangkan

aspirasi yang pro rakyat melalui organisasi kemahasiswaan (ormawa) memiliki tugas utama yang dinamakan Tri Darma Perguruan Tinggi. Komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran atau pengajaran penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara proporsional oleh mahasiswa dalam kesehariannya.

Melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa) diharapkan mahasiswa dapat mengamalkan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dan meluruskan kembali penyimpangan nilai demokrasi Pancasila. Kegiatan dalam organisasi kemahasiswaan merupakan sebuah pembelajaran agar mahasiswa dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1) untuk memahami secara mendalam hubungan organisasi kemahasiswaan (ormawa) dan pembelajaran nilai-nilai demokrasi Pancasila, 2) untuk menganalisa bentuk penerapan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) adalah memunculkan ide-ide terbaru dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan memanfaatkan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini yang berasal dari buku dan jurnal-jurnal ilmiah. Beberapa jurnal ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alwan, M. Z. W. (2021). Penerapan Demokrasi Pancasila Dalam Proses Pemilihan Ketua Umum Himnas Ppkn Pada Kongres Dan Rakernas Di Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018 Warsono Abstrak. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 09, Octavia, E., & Rube'i, A. (2019). Implementasi Sila Ke Empat Berlandaskan Pancasila Pada Mahasiswa Ikip Pgri Pontianak. yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah *Sosial*

*Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 6., dan lain-lain. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Organisasi Kemahasiswaan Sebagai Wadah Pembelajaran Demokrasi Pancasila.

Perguruan tinggi memegang tanggung jawab dalam memberi bekal kepada mahasiswanya dengan keterampilan atau *hard skill* sehingga mahasiswa mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja. Namun tidak hanya sebatas penanaman *hard skill* saja, perguruan tinggi juga harus memberikan penanaman nilai karakter atau *soft skill* agar pada akhirnya mahasiswa ini memiliki rasa peka dalam interaksi sosial yang dilakukannya, baik dalam interaksi sosialnya dengan masyarakat, maupun dalam bidang pekerjaan yang dilakoninya. Pembentukan karakter mahasiswa tidak hanya dilaksanakan dalam proses penyampaian materi perkuliahan, namun juga didapatkan melalui organisasi dalam melakukan aktifitas kemahasiswaannya yang memiliki tujuan untuk mengembangkan nilai intelektual serta integritas yang tentunya akan sangat berguna saat mahasiswa tersebut telah berkecimpung dalam kehidupan masyarakat secara langsung. Pengembangan tersebut diselaraskan dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki wadah atau tempat untuk mengisi waktu luangnya sebagai pengembangan bakat, dan tujuannya dalam berorganisasi pada akhirnya dapat dicapai.

Adapun fungsi organisasi kemahasiswaan diatur dalam Pasal 77 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:

- a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;
- b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
- c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan

- d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Organisasi kemahasiswaan merupakan salah satu elemen yang sangat penting selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Keberadaan organisasi kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawan, integritas kepribadian, menanamkan sikap ilmiah, dan pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.(Nur Utomo et al., 2020)

Organisasi kemahasiswaan (ormawa) mempunyai posisi sebagai wahana pembelajaran berdemokrasi bagi mahasiswa. Optimalisasi organisasi kemahasiswaan sebagai laboratorium demokrasi dioperasionalkan dalam bentuk program kerja dan aktivitas organisasi yang mendorong terciptanya sikap saling menghargai, keberanian mengemukakan pendapat, budaya berselisih secara sehat, kemandirian, kepemimpinan, tanggung-jawab pribadi dan sosial, dan lain sebagainya.(Marlina, 2021)

Beberapa nilai demokrasi yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan di dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, yakni: 1) Menyelesaikan persoalan secara melem-baga; 2) Menjamin terseleng-garannya perubaha secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; 3) Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur; 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum; 5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keaneka-ragaman; 6) Menjamin tegaknya hukum dan keadilan.(Gunarsi et al., 2014)

Tidaklah cukup untuk memahami apa substansi atau nilai-nilai pokok dari demokrasi tersebut, tanpa diimbangi dengan telaah atas makna dan nilai pokok demokrasi, terlebih memaksakan konsep nilai demokrasi yang tidak sesuai dengan sosio - kultur masyarakat untuk membangun kompetensi kewarganegaraan yang demokratis. Oleh karena itu, pe-

mahaman secara utuh dalam konteks kompetensi kewarganegaraan atas konsep dan hakikat serta nilai-nilai pokok demokrasi kiranya merupakan suatu keharusan yang tidak dapat terbantahkan, lebih-lebih untuk mewujudkan warga negara yang demokratis, partisipatif, dan bertanggung jawab(Sadeli & Kartikawati, 2019)

Melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan (ormawa), mahasiswa dapat belajar untuk menyampaikan pendapat berani mengambil keputusan, serta bertanggung-jawab dalam mengemban amanah yang diberikan sebagai seorang pemimpin. Mahasiswa juga dapat mengembangkan kemampuan diri atau *soft skills* dan melatih diri dalam berinteraksi sosial serta dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman agar mahasiswa sebagai *agent of change* dapat berguna di masyarakat (Mardawani, 2018)

Mengingat organisasi kemahasiswaan (ormawa) berfungsi untuk melatih mahasiswa agar siap terjun ke masyarakat, maka organisasi kemahasiswaan (ormawa) memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah pembelajaran dalam rangka penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Dalam organisasi kemahasiswaan (ormawa), mahasiswa dituntut untuk berani mengemukakan pendapat, menghargai perbedaan pendapat, dan menyelesaikan persoalan yang timbul dengan musyawarah mufakat.

### **3.2. Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan**

Dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan, aktualisasi nilai-nilai demokrasi selalu menjadi barometer untuk menakar keberhasilan dalam berorganisasi. Asas musyawarah menjadi ukuran dalam penyelesaian masalah, dan tidak berorientasi pada pola hegemoni otoritas kekuasaan dan dominasi mayoritas sebagai cara menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. (Ladamay & Assanusi, 2019) Untuk itu perlu ditanamkan sikap dan perilaku demokratis melalui

pendidikan demokrasi di organisasi kemahasiswaan.

Secara esensial pendidikan demokrasi dapat melahirkan budaya demokrasi dalam kerangka untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang ideal. Mewujudkan demokrasi yang tidak sekedar dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat atau keterlibatan langsung rakyat dalam mengambil kesimpulan politik, namun lebih dari itu.

Pendidikan demokrasi itu sendiri selaras dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional itu sendiri adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan membentuk akhlak mulia dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai-nilai religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar dapat berpikir secara rasional, dan berakhlak mulia dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religius, serta konstruktif dan kreatif agar mampu bertanggung jawab untuk memajukan bangsa Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat modern didasarkan pada demokrasi dan keadilan.(Soeprpto, 2013)

Pendidikan demokrasi merupakan suatu bentuk penanaman nilai-nilai demokrasi kepada generasi penerus bangsa untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang dapat berperilaku secara demokratis. Pendidikan demokrasi di organisasi kemahasiswaan dimulai kaderisasi program pelatihan kepemimpinan, kajian dan diskusi terkait isu-isu kontemporer dengan seminar kebangsaan, serta berbagai macam training baik tentang organisasi dn lain-lain, serta pembelajaran politik dalam bentuk diskusi publik dan berpartisipasi dalam pemilihan umum mahasiswa. Hal ini berarti pemahaman demokrasi dalam dunia pendidikan khususnya bagi masyarakat umum dalam tuntutan akademik dirasa masih tinggi.(Darmawan Harefa & Fatolosa Hulu, 2020)

Konstruksi pendidikan demokrasi Pancasila sudah cukup terstruktur dimana muatan dan materi serta metode cukup berkorelasi dengan pemahaman pendidikan demokrasi, serta menumbuh kembangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang harus senantiasa ditumbuhkan dan dikembangkan pada diri mahasiswa. Nilai-nilai demokrasi Pancasila yang terkandung bersumber dari sila keempat Pancasila yang berbunyi: “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah: 1) Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat; 2) Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain; 3) Mengutamakan musyawarah dalam meng-ambil keputusan untuk kepentingan bersama; 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat ke-keluargaan; 5) Dengan itikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan msyawarah; 6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; dan 7) Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan(Octavia & Rube’i, 2019)

Demokrasi Pancasila ialah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan paham yang dianut Indonesia pada masa lalu. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan representasi yang mewakili kepribadian Bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang.(Nugroho, 2020)

Secara nyata bentuk penerapan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam organisasi kemahasiswaan tercermin dalam musyawarah mahasiswa/sidang umum dimana mana mahasiswa bebas mengemukakan pendapat, belajar menghargai pendapat orang lain, dan menjalankan mekanisme pengambilan keputusan dengan

menjunjung tinggi musyawarah mufakat.(Arikunto, 2015)

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwa organisasi kemahasiswaan (ormawa) berfungsi untuk melatih mahasiswa agar siap terjun ke masyarakat, maka organisasi kemahasiswaan (ormawa) memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah pembelajaran dalam rangka penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Secara nyata bentuk penerapan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan tercermin dalam musyawarah mahasiswa/ sidang umum yang mana mahasiswa bebas mengemukakan pendapat, belajar menghargai pendapat orang lain, dan menjalankan mekanisme pengambilan keputusan dengan menjunjung tinggi musyawarah mufakat.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Besar harapan kiranya penelitian ini berguna untuk menguatkan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alwan, M. Z. W. (2021). Penerapan Demokrasi Pancasila Dalam Proses Pemilihan Ketua Umum HIMNAS PPKn Pada Kongres Dan Rakernas Di Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2018 Warsono Abstrak. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 09.
- Arikunto, S. (2015). Metode Penelitian. *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Darmawan Harefa, & Fatolosa Hulu. (2020). Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan. In *PM Publisher, Jawa Timur*.
- Gunarsi, S., Bayu, Nugraha, A., & Wahono, T. (2014). Pelaksanaan nilai demokrasi di kalangan mahasiswa (Studi kasus pada mahasiswa program studi PKN FKIP UMS). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24.
- Hidayat, W., & Taufikurrahman, T. (2020). Aktivisme Politik Mahasiswa Islam Membangun Demokrasi Pasca Orde Baru. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(2). <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1934>

- Hijriadi Askodrina. (2022). Penguatan Kecerdasan Idiologis Dan Yuridis (Teologis – Historisitasi). *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 16(2). <https://doi.org/10.55558/alihda.v16i2.56>
- Ladamay, O. Moh. M. A., & Assanusi, M. Y. (2019). Implementasi Nilai Demokrasi Dalam Pembinaan Komitmen Kebangsaan Pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muham-madiyah Gresik. *Tamaddun*, 20(1). <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v20i1.2773>
- Mardawani, L. (2018). Peran Mahasiswa Dalam Upaya Membentuk Generasi Muda Berkarakter Melalui Pendekatan Humanis Berbasis Kearifan Lokal Suku Dayak di Desa Telaga II. *Jurnal PEKAN*, 3(1).
- Marlina, R. (2021). Nilai-Nilai Demokrasi Sebagai Landasan Berpikir Kritis Mahasiswa. *Jambura Journal Civic Education*, 1(2). <https://doi.org/10.37905/jacedu.v1i2.12802>
- Novianty, F., & Firmansyah, S. (2020). Peran Dosen Program Studi Ppkn Dalam Mengembangkan Budaya Demokrasi Pancasila Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarga-negaraan*, 4(1). <https://doi.org/10.31571/pkn.v4i1.1793>
- Nugroho, F. T. (2020). *Pengertian Demokrasi Pancasila, Ketahui Prinsip dan Tujuannya*. Liputan6.Com.
- Nur Utomo, H. J., Saepudin, A., & Arofah, K. (2020). Membangun Model Budaya Organisasi Berbasis Bela Negara Menuju Perguruan Tinggi Negeri Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum (Ptn Pk-Blu) Upn "Veteran" YogyakartaA. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(1). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i1.822>
- Octavia, E., & Rube'i, A. (2019). Implementasi Sila Ke Empat Berlandaskan Pancasila Pada Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 6(1). <https://doi.org/10.31571/sosial.v6i1.1261>
- Prabowo, R. E. (2011). Demokrasi Pancasila Sebagai Model. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(1).
- Rube'i, M. A., & Ridwansyah, A. (2017). Implementasi Budaya Demokrasi Untuk Membentuk Civic Disposition Pada Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Ikip-Pgri Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).
- Sadeli, E. H., & Kartikawati, R. (2019). Persepsi Mahasiswa terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila dalam Menangkal Paham Radikalisme (Studi Kasus pada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Korkom .... *Proceeding of The URECOL*.
- Sadeli, E. H., & Priyanto, E. (2020). Students' Perception Towards The Democratic Values Of Pancasila On Preventing Radicalism.

*DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 7(2).  
<https://doi.org/10.21831/dimensia.v7i2.32628>

Soeprapto, S. (2013). Landasan Aksiologis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan. *Cakrawala Pendidikan*, 0(2).

Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah. *Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1).  
<https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10763>

Susanto, E. (2021). Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1).  
<https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.84-93>